

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika membicarakan pendidikan maka kita juga akan membicarakan tentang kehidupan, karena pendidikan merupakan suatu kerja aktif yang berjalan hampir selama kehidupan ini terbentuk. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini maka ia akan mulai untuk belajar hingga kelak ia meninggalkan dunia ini. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus suatu bangsa, karena kekuatan dan kelemahan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa matang dan dewasanya pemikiran dari warganya. Dan tentunya, “*maturity*” sangat ditentukan oleh faktor pendidikan yang diperoleh oleh tiap orang.

Istilah pendidikan diambil dari bahasa Inggris “*education*” yang berasal dari bahasa Latin “*educare*”, yang dapat diartikan pembimbingan berkelanjutan (*to lead forth*). Jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia.¹ Setiap manusia yang memiliki akal dan pikiran pada dasarnya dituntut untuk menguasai beberapa pengetahuan sebagai bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan sekitar, maupun terhadap alam. Proses pencarian dan pemenuhan pengetahuan tersebut telah dilakukan oleh manusia pra-sejarah sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun, proses bimbingan itu menjadi ter-lembagaisasi sejak manusia mulai mengenal huruf.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka keberadaan pendidikan melekat erat pada dan dalam diri manusia sepanjang zaman. Jadi, pendidikan merupakan masalah khas manusia, dalam artian hanya makhluk manusia saja yang eksistensi kehidupannya mempunyai persoalan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh dan untuk diri manusia sendiri, dengan sasaran untuk mengembangkan pengetahuan serta untuk menyusun teori-teori keilmuan. Sasaran pendidikan ini berfungsi sebagai alat, sarana, dan jalan untuk membuat perubahan menuju perkembangan hidup. Pada titik inilah manusia mewujudkan dirinya

¹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Jember: Ar Ruz Media, 2006), hlm. 77.

sebagai “makhluk pendidikan”. Tersirat dalam kodratnya sebagai makhluk pendidikan, atas potensi kodrat cipta, rasa, dan karsanya, manusia berkemampuan untuk “dididik” dan “mendidik”.

Jika kita ingin menelaah pendidikan dalam konteks yang lebih luas, maka pendidikan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung di segala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu.² Dalam pengertian yang lebih sederhana maka ada tiga hal pokok yang hendak dikemukakan, bahwa pendidikan merupakan proses menuju: pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Pendidikan dalam konteks yang luas dapat diturunkan dalam pengertian pendidikan yang lebih sempit. Dalam konteks ini, pendidikan diartikan sebagai seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan, dan kegiatan seperti ini dilakukan dalam lembaga pendidikan seperti sekolah.

Ketika pendidikan berfungsi untuk menciptakan individu yang dewasa, cerdas, dan matang secara emosional, maka sudah seharusnya proses dalam pendidikan merupakan suatu proses ‘mendidik’ bukan ‘mengajarkan’. Secara harafiah pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan: proses, cara, perbuatan mendidik. Sedangkan, mendidik secara harafiah berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.³ Mendidik dalam artian di sini merupakan proses transfer ilmu yang bersifat dua arah antara pendidik dan orang yang dididik, dan karena korelasional yang aktif inilah maka proses pendidikan dapat membentuk kepribadian peserta didik yang kreatif, inovatif, terbuka, dan matang secara emosional. Lain halnya dengan proses mendidik, mengajar lebih identik dengan proses transfer ilmu yang satu arah, yaitu dari

² *Ibid.*, hlm :80.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm: 263. Dalam pengertian pendidikan term pengajaran menjadi bagian dalam proses pendidikan. Namun, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa proses pengajaran harus pula di ikut sertakan dengan proses pelatihan yang intensif.

pendidik kepada orang yang dididik. Secara harafiah mengajar berasal dari kata 'ajar' yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (dituruti); dan mengajar merupakan kegiatan memberi pelajaran.⁴ Proses mengajar ini memiliki implikasi pada mereduksinya kreatifitas, pasifitas, dan penundaan kematangan secara emosional yang dikarenakan peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk berdialog dan mengemukakan pendapat kepada pendidik.

Jika kita telaah lebih lanjut, pada kenyataannya tiap-tiap orang memiliki suatu harapan akan pendidikan yang ideal bagi mereka, agar tiap-tiap mereka dapat mengembangkan potensi diri tanpa adanya opresi yang mungkin akan mereka dapatkan dalam berlangsungnya proses pendidikan. Pendidikan ideal harus berpijak pada pengembangan keutuhan seorang peserta didik agar muncul *self-realisation*-nya dengan baik. Sangat tidak bijaksana ketika kegiatan pendidikan justru hanya menekankan sisi kecerdasan intelektual semata-mata. Daniel Goleman dalam bukunya *Emotional Intelligence* (Sidi, 2001, Hlm.53) bahwa IQ seseorang hanya menyumbang 20% dari kesuksesan seseorang, sedangkan 80 % sisanya ditentukan oleh faktor lain (kecedasan intelektual dan kecerdasan emosional). Pendidikan ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan domain-domain tersebut sehingga lahirnya masyarakat peradaban (*civilize culture society*), dan akan menciptakan masyarakat yang sadar (*conscious community*).⁵

Pendidikan yang ideal pada hakikatnya berupaya untuk menempatkan manusia dalam tataran sebagai subjek dalam proses pendidikan, atau dengan kata lain untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan yang berlangsung diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk pendidikan yang humanis, dalam artian menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok yang setara di dalam suatu komunitas. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari "to have" (apa saja materi yang dimilikinya) dan "to do" (apa yang telah berhasil dilakukannya) daripada

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm: 17. Pelajaran merupakan yang dipelajari atau yang diajarkan .

⁵ Effendi Hasan, *Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Ideal*, www.id.acehinstitute.org (diakses pada 2 april 2009, pukul. 19.25).

keberadaan pribadi yang bersangkutan (“*to be*” atau “*being*”nya). Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bawa keberadaan seorang pribadi jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab, manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan diharapkan mampu untuk menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia.

Di dalam pendidikan yang ideal juga tidak boleh ada intervensi terhadap peserta didik. Intervensi dalam pendidikan biasanya dapat menjelma dari beberapa kasus yang sering muncul diantaranya: intervensi dari guru kepada murid, sistem terhadap pelaku pendidikan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan lain-lain. Karena kita ketahui bersama bahwa pada saat ini pendidikan masuk ke dalam ranah wujud hak asasi manusia yang harus dipenuhi, karena pendidikan adalah universal dan hak semua orang (*education is universal and for all*). Melalui pendidikan yang ditempuh, manusia ditempa menuju kemandirian dan kesuatu wujud pemerataan untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya.

Ada kesamaan fokus yang menjadi ciri hakiki dari suatu garapan pendidikan yakni pendidikan diwujudkan maksimal dalam usaha manusia untuk memanusiakan manusia. Pendidikan sebagai proses, memberi makna bahwa garapan pendidikan akan selalu dinamis, sistematis, berkelanjutan, dan sejalan dengan dinamika serta perubahan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya intervensi dibutuhkan metode “*andragogi*” dalam setiap proses pendidikan. Dengan konsep ini peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam pendidikan, bukan sebagai bahan eksploitasi untuk diintervensi, dalam pengertian lain ada suatu nuansa demokratisasi dalam setiap proses pendidikan. Pendidikan di sini sangat diharapkan tidak menjadi suatu hal yang dikultuskan (sosok yang superior) di mana siswa tidak memiliki hak apa-apa dalam menentukan sesuatu.

Jika kita kaitkan dengan penerapannya di Indonesia, proses pendidikan masih banyak menemukan kendala dalam pengaplikasiannya. Selama ini, sistem pendidikan di Indonesia lebih berupa proses ‘*pengajaran*’ bukan ‘*pembelajaran*’. Padahal, Dalam UU sangat jelas menyebutkan term ‘*Pendidikan*’ sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (UU RI No. 2 thn 1989, Bab 1, Pasal 1), agar seperangkat hasil pendidikan tercapai oleh peserta didik setelah diadakannya kegiatan pendidikan.⁶ Dari UU tersebut ternyata term 'pengajaran' digunakan sebagai suatu cara dalam mendidik peserta didik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentunya memiliki alasan yang kuat mengapa sistem pengajaran dimasukkan sebagai salah satu cara untuk mendidik siswa, salah satu alasan mendasar adalah untuk membuat penyamarataan standar pendidikan nasional. Jika hal ini tidak menjadi dominan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, maka dirasa peserta didik tidak akan menjadi korban ambisi pencapaian standar. Namun, kenyataannya di lapangan proses pengajaran yang bertujuan untuk mencapai suatu standar nasional menjadi sangat dominan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia yang mencoba memuat proses pengajaran yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu standar nasional, ternyata juga belum menunjukkan hasil yang signifikan dan memuaskan dalam peningkatan aspek kognitif peserta didik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti misalnya: siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.⁷ Selain itu, hasil studi *The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R 1999*, memperlihatkan bahwa, di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah *Asia Week* dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.⁸ Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul *Human Development Report*

⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 2-3.

⁷ *Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004)*.

⁸ *Trends in Mathematic and Science Study TIMSS-R, 1999*.

2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara.⁹

Dari fakta tersebut maka dapat dilihat bahwa proses pengajaran-pun belum mampu untuk menghasilkan *output* kognisi yang cukup baik. Dan oleh karena itu, lagi-lagi peserta didik menjadi korban dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang lebih menekankan pada pengajaran. Padahal seharusnya kemampuan peserta didik harus dilihat dari tiga aspek, yakni : pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara beriringan, dan lembaga pendidikan harus dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan dirinya. Namun yang terjadi selama ini malah sebaliknya, sistem pendidikan di Indonesia cenderung mengintervensi siswa sebagai objek pendidikan dengan dalih pengajaran dalam berbagai bentuk, misalnya: intervensi guru terhadap murid dengan hukuman jika tidak mengerjakan tugas, kurikulum yang membebankan siswa dengan banyaknya beban belajar tanpa adanya proses pengaplikasian ilmu yang didapat secara langsung, sehingga siswa menjadi pihak yang teropresi sebagai objek dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Jika kita melihat perjalanan penerapan kurikulum di Indonesia, maka kita dapat melihat dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan yang terakhir adalah kurikulum penyempurna kurikulum terdahulu yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

⁹ www.undp.org (diakses 20 Februari 2009, pukul. 15.25).

Permasalahan penempatan posisi siswa sebagai subjek ini pada dasarnya muncul pada jenjang pendidikan menengah. Jika kita mengacu pada undang-undang sistem pendidikan nasional, jalur jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri dari tiga yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Permasalah penempatan posisi siswa sebagai subjek kerap kita dapatkan pada jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut dikarenakan, pada jenjang pendidikan dasar peran guru memang harus dominan dan sentral dalam merangsang pertumbuhan kognitif siswa. Pada jenjang pendidikan tinggi, seharusnya peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam perolehan pengetahuan, karena pada jenjang ini peserta didik dituntut untuk mampu mengembangkan diri berdasarkan kemampuannya masing-masing. Sedangkan siswa pada jenjang pendidikan menengah, merupakan individu yang seharusnya dipersiapkan untuk matang secara emosional, sehingga kelak mampu membuat putusan-putusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Di sini, peran guru dalam jenjang pendidikan menengah seharusnya menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswanya.

Hingga dipenghujung tahun 1973 sistem pendidikan yang tercermin dalam kurikulum masih menggunakan prinsip ‘pedagogy’ bahwa pendidikan itu menempatkan peserta didik sebagai objek di dalam pendidikan, mereka harus menerima pendidikan yang sudah di *set up* atau yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan, di *set up* oleh gurunya atau pengajarnya apa-apa saja yang harus dipelajari, materi-materi apa saja yang akan diterima, yang akan disampaikan, metode panyampaiannya, dan lain-lain. Semua itu tergantung kepada pengajar dan tergantung kepada sistem.¹⁰ Hal itu terbukti dilakukan pada kurikulum 1947 yang disebut “*leer plan*” yang lebih bersifat politis, kurikulum 1952 yang disebut rencana pelajaran terurai 1952 yang lebih menekankan pada rincian setiap mata pelajarannya, berlanjut pada kurikulum 1964, 1968, hingga kurikulum 1975. Baru pada kurikulum 1984 posisi siswa sebagai peserta didik ditempatkan sebagai ‘subjek’ dalam sistem pendidikan nasional, dengan mengusung “*skill approach*”,

¹⁰ sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia, (diakses pada 20 Maret 2009, pukul. 21.00).

dan secara legal posisi tersebut di atur dalam UU hingga terakhir diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006.¹¹

Ketika posisi peserta didik dalam sistem pendidikan telah berubah dari 'objek' menjadi 'subjek' maka seharusnya terjadi transformasi besar dalam proses mendidik siswa dan fokus tujuan yang ingin dicapai dari proses pendidikan tersebut. Proses mendidik siswa tidak hanya terpusat pada pengajaran yang satu arah, namun merupakan proses transformasi dialogis antara pendidik dan orang yang dididik, sehingga tujuan dari proses pendidikan tidak hanya untuk mencapai suatu standar yang telah ditetapkan, namun juga untuk menciptakan pendewasaan, pencerdasan, pematangan diri, dan yang jauh lebih penting untuk memanusiakan manusia. Itu semua tidak bisa dicapai dalam sistem transfer pengetahuan yang satu arah.

Walaupun semenjak diberlakukannya kurikulum 1984 posisi siswa telah ditetapkan sebagai subjek dalam pendidikan, namun pada kenyataannya di lapangan siswa masih diposisikan sebagai objek dalam proses belajar mengajar. Hal yang paling fundamental mengapa hal ini terjadi adalah:

1. Sebagian besar tenaga pendidik adalah tenaga pendidik lama yang masih menganut paham konservatisme, yaitu masih bertahan dengan tatanan lama yang memiliki pandangan bahwa proses mendidik adalah merupakan proses pengembangan kognisi yang indikatornya adalah keberhasilan dalam bidang intelektual.
2. Adanya standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh satuan pendidikan. Penekanan standar di sini lebih pada standar intelektual dibandingkan pemenuhan standar psikomotorik dan afektif.
3. Karena tuntutan pemenuhan standar, tenaga pendidik biasanya sering melakukan intervensi terhadap peserta didik jika peserta didik tidak mampu untuk memenuhi standar yang telah ditentukan. Inilah yang biasa disebut sebagai bentuk opresi dalam pelaksanaan sistem pendidikan.

¹¹ *Kurikulum di Indonesia*, meilanikasim.wordpress.com, (diakses pada 23 Maret 2009, pukul. 21.10).

Dari operasi tersebut maka implikasi yang sangat mungkin dialami siswa adalah perasaan tertekan, mereduksi kreatifitas, dan pasifnya siswa sebagai peserta didik. Sistem pengajaran hanya menyediakan proses pengajaran yang satu arah, dalam pengertian lain siswa hanya menerima materi yang diberikan guru, tanpa diperkenankan untuk mengeksplorasi kemampuannya sendiri, dan mengaplikasikannya. Mekanisme menghafal yang selalu ditekankan oleh tenaga pendidik sangat dimungkinkan menjadi penyebab mereduksinya kreativitas.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tergugah untuk menganalisa permasalahan posisi siswa dalam sistem pendidikan nasional, mengingat dari pengalaman peneliti bahwa sejauh ini sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menempatkan siswa sebagai subjek dalam pendidikan. Peran guru masih sangat sentral dalam transfer informasi, sehingga siswa tak layak sebagai objek yang pasif dalam proses pendidikan. Pemilihan topik ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perjuangan siswa untuk mendapatkan hak sebagai subjek dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengkritisi konsep pengaplikasian pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia yang secara aplikatif belum menempatkan siswa sebagai subjek dalam proses pendidikan, dan dalam pengertian lain belum berupaya menuju proses memanusiakan manusia, walaupun kenyataannya secara legal dalam UU telah diatur dan ditetapkan bahwa posisi siswa adalah sebagai subjek. Dan semua permasalahan tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis pendidikan dari pemikir besar pendidikan abad 20 Paulo Freire.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana posisi siswa sebagai subjek dalam kerangka filsafat pendidikan Paulo Freire?
2. Apa dan bagaimana posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional?

3. Bagaimana keterkaitan posisi siswa dalam konsep filsafat pendidikan Paulo Freire dengan posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional?

C. Thesis Statement

1. Filsafat pendidikan Paulo Freire telah memposisikan siswa sebagai subjek dalam proses pendidikan.
2. Sistem pendidikan nasional secara implisit telah mengatur posisi siswa sebagai subjek, namun dalam pengimplementasiannya siswa masih diposisikan sebagai objek dalam proses pendidikan.

D. Kerangka Teori

Dalam menganalisa posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional, peneliti menggunakan pendekatan filsafat pendidikan Freire sebagai bahan acuan untuk menganalisa sistem pendidikan nasional. Beberapa konsep Freire yang akan dikaji adalah konsep pendidikan sebagai praktik pembebasan yang menekankan pada adanya suatu proses dialog dalam pendidikan, dan bahwa para pendidik dapat belajar bersama-sama dengan peserta didik. Konsep yang kedua adalah pendidikan kritis yang akan menciptakan suatu kesadaran kritis, dan berusaha untuk mengintegrasikan diri dengan realitas yang berdampak pada timbulnya kritisisme sosial. Konsep ketiga adalah pendidikan hadap masalah yang memungkinkan adanya suatu konsientisasi (penyadaran) dalam proses pendidikan dan merupakan solusi dari pendidikan gaya bank.

Konsep keempat adalah dialog yang merupakan suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang setara tanpa adanya suatu bentuk dominasi antara individu satu terhadap individu lain, dialog merupakan bentuk penting dalam proses pendidikan. Konsep terakhir adalah pendidikan humanis, dalam pandangan ini proses pendidikan diharapkan mampu untuk memanusiakan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang otonom dan memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Konsep dialog dalam proses pendidikan Freire

juga akan diperkuat dengan konsep dialektika Sokrates karena Freire banyak terinspirasi dari pemikiran Sokrates.

Sistem pendidikan nasional yang dibahas pada bab ini dibatasi pada penempatan posisi siswa pada pendidikan menengah dalam sistem pendidikan nasional terutama pada UU No 20 tahun 2003, dan juga peran guru dalam undang-undang tersebut. Konsentrasi subjek dalam penelitian ini adalah siswa pada jalur pendidikan menengah, hal ini lebih dikarenakan karena jalur pendidikan dasar masih sangat membutuhkan peran guru yang sentral. Hal ini sangat dimungkinkan karena siswa pada jalur pendidikan dasar merupakan individu dengan masa pertumbuhan kognitif yang membutuhkan bantuan asupan ilmu dari pihak luar dirinya, dan dalam hal ini adalah guru. Selain itu, jalur pendidikan tinggi tidak masuk dalam konsentrasi pembahasan karena pada dasarnya individu-individu dalam jenjang pendidikan tinggi harus mampu memaksimalkan potensi diri sendiri untuk memperoleh informasi secara pribadi.

Posisi siswa sebagai subjek dan peran guru dalam sistem pendidikan nasional juga dikaji pada historisitas pembabakan kurikulum sejak masa prakemerdekaan hingga masa reformasi. Alasan pemilihan UU No 20 tahun 2003 sebagai sumber rujukan utama karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang penyempurna undang-undang sistem pendidikan nasional pendahulunya yaitu UU No 2 tahun 1989. Undang-undang tersebut juga melakukan transformasi besar dalam mengembalikan peran siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskripsi analisis. Deskripsi analisis merupakan metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap, serta pandangan-pandangan. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena atau pemikiran tokoh yang diselidiki.¹²

F. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi siswa sebagai subjek dalam filsafat pendidikan Paulo freire.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pendidikan nasional telah mengatur dan memposisikan siswa sebagai subjek dalam pendidikan.
3. Jika peraturan tersebut telah ada, bagaimana pengimplementasiannya di lapangan terkait dengan hubungan antara guru sebagai tenaga pendidik dan siswa sebagai peserta didik.

G. Kegunaan

Kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Kegunaan praktis, yakni sebagai:
 - a. Kegunaan untuk penulis, menambah wawasan disertai dengan pola pikir yang rasional, inovatif, dan kritis terhadap permasalahan pendidikan.
 - b. Memberi masukan kepada pihak terkait, dalam hal ini pihak pemerintah untuk dapat mengkaji secara mendalam sistem yang telah diberlakukan
2. Kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai:
 - a. Memperkuat teori yang telah ada, dalam hal ini teori Freire tentang pendidikan kritis, urgensi dialog dalam proses pendidikan, pendidikan hadap masalah, dan pendidikan humanis.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori yang telah ada.

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 54

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan memuat 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai :

- a. Latar belakang pemilihan topik yang meliputi: gambaran ideal pendidikan yang pada dasarnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, dan tidak boleh ada unsur penindasan dalam proses mendidik. Digambarkan bahwa proses pendidikan sangat rentan akan praktik penindasan terhadap siswa, oleh karena itu setiap aspek pendidikan perlu mewujudkan suatu proses pendidikan yang humanis.
 - b. Rumusan masalah yang akan membahas masalah posisi siswa dalam kerangka pemikiran Paulo Freire, Sistem Pendidikan Nasional, dan keterkaitan antara keduanya.
 - c. Tujuan dari penulisan skripsi yang berupaya untuk menemukan konsep posisi siswa dalam filsafat pendidikan Freire, peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan yang menempatkan posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan. Serta analisa posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional dalam kerangka filsafat Paulo Freire.
 - d. Luaran berupa gambaran posisi siswa dalam sudut pandang Paulo Freire dan dalam sistem pendidikan nasional.
 - e. Dan yang terakhir adalah manfaat dari penulisan skripsi ini dari sisi praktis dan teoritis.
2. Bab 2 akan memaparkan bagaimana Freire menempatkan siswa sebagai subjek dalam pendidikan yang di ekstrak dari konsep pendidikan sebagai alat perjuangan politis, pendidikan sebagai praktik pembebasan, dan konsep penyadaran mistis dan kritis.
 3. Bab 3 akan memaparkan posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional. Secara khusus yang akan dibahas adalah posisi

siswa dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disamping juga membahas historisitas perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia yang menempatkan transformasi posisi siswa, dari siswa sebagai objek menjadi siswa sebagai subjek.

4. BAB 4 lebih bersifat analisa dalam melihat posisi siswa dalam sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan kerangka filsafat pendidikan Paulo Freire. Sistem pendidikan nasional yang telah mengatur posisi siswa dalam berbagai peraturan pendidikan belum diimbangi dengan pengimplementasiannya. Di lapangan, masih banyak siswa yang diposisikan sebagai objek dalam proses pendidikan. realitas inilah yang coba dikaji dalam kerangka filsafat pendidikan Paulo Freire, terutama tentang konsep posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan.
5. BAB 5 akan berisi kesimpulan dan saran terhadap analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.